

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan secara bertahap telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini, diantaranya dengan meningkatkan kualitas guru melalui berbagai cara diantaranya, pemberian beasiswa dalam rangka melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dan S2, melengkapi sarana dan prasarana belajar dengan memperbaiki gedung sekolah, melengkapi alat dan bahan laboratorium, melengkapi buku-buku di perpustakaan, meningkatkan manajemen pendidikan melalui workshop, pelatihan dan juga melalui jenjang pendidikan S1, S2 baik untuk kepala sekolah maupun pegawai administrasi, serta menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berbagai indikator mutu pendidikan masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Menurut Ashaluddin Jalil Rektor Universitas Riau, dari tahun ke tahun calon mahasiswa asal Riau (tanpa merinci asal Kota/Kabupatennya) yang lulus melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) untuk Universitas Riau jumlahnya sangat sedikit. Tahun 2009 hanya 16 persen calon mahasiswa baru lulus mengikuti SNMPTN untuk Universitas Riau (Riau Pos, 2011). Ketidakpuasan berjenjang juga terjadi, dimana kalangan SMP merasa bekal lulusan SD kurang mampu untuk memasuki SMP dan kalangan SMA merasa lulusan SMP tidak siap mengikuti pembelajaran di sekolah menengah atas, kalangan perguruan tinggi merasa bekal lulusan SMA belum siap untuk mengikuti perkuliahan. Berdasarkan data dari Badan Standar Nasional tahun ajaran 2009/2010 tingkat kelulusan siswa SMA pada ujian nasional untuk Kota Dumai berada pada peringkat sembilan sedangkan Kabupaten Rokan Hilir berada pada peringkat enam dari 12 (dua belas) Kabupaten /Kota yang ada di Propinsi Riau. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya materi pelajaran yang belum dikuasai peserta didik dengan baik. Besarnya persentase penguasaan materi yang berada di bawah standar kelulusan pada ujian nasional untuk masing-masing bidang studi yang diuji dapat dilihat pada Table 1 untuk kelompok IPA dan Tabel 2 untuk kelompok IPS berikut ini.



Tabel 1. Persentase penguasaan materi ujian nasional yang belum mencapai standar kelulusan untuk kelompok IPA

No	Tahun	Kota/ Kabupaten	Mata Pelajaran					
			B.Ind	B.Ingg	Matem	Fisika	Kimia	Biologi
1	2007/2008	Dumai	12%	20%	2,5%	10%	5%	12,5%
		Rokan Hilir	26%	48%	35%	30%	32,5%	27,5%
2	2008/2009	Dumai	14%	6%	0%	5%	0%	20%
		Rokan Hilir	24%	30%	35%	32,5%	17,5%	40%
3	2009/2010	Dumai	22%	4%	2,5%	7,5%	12,5%	5%
		Rokan Hilir	10%	8%	0%	22,5%	7,5%	12,5%

Tabel 2. Persentase penguasaan materi ujian nasional yang belum mencapai standar kelulusan untuk kelompok IPS

No	Tahun	Kota/ Kabupaten	Mata Pelajaran					
			B. Ind	B. Ing	Matem	Ekonom	Geografi	Sosiologi
1	2007/2008	Dumai	34 %	42 %	47,5 %	12,5 %	57,5 %	22,5 %
		Rokan Hilir	26 %	36 %	22,5 %	15 %	50 %	15 %
2	2008/2009	Dumai	30 %	14 %	2,5 %	7,5 %	10 %	25 %
		Rokan Hilir	32 %	12 %	5 %	20 %	12,5 %	22,5 %
3	2009/2010	Dumai (A)	26 %	0 %	2,5 %	25 %	32 %	34 %
		Dumai (B)	10 %	6 %	7,5 %	15 %	30 %	30 %
		Rohil (A)	36 %	4 %	7,5 %	22,5 %	32 %	32 %
		Rokan Hilir(B)	14 %	12 %	7,5 %	15 %	30 %	18 %

Dari kedua tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase penguasaan materi yang belum mencapai standar kelulusan (55%) berturut-turut dari tahun 2007/2008-2009-2010 adalah 2,5% sampai 48%; 0% sampai 40%; dan 0% sampai 22,5% untuk kelompok IPA, sedangkan untuk kelompok IPS lebih tinggi yaitu antara 12,5% sampai 57,5%; 2,5% sampai 32%; dan 0% sampai 36%. Fakta tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan pendidikan yang selama ini dilakukan belum

mampu memecahkan masalah dasar pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir. Solusi atas permasalahan pendidikan di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir tersebut tentu perlu dicarikan. Semua pihak harus bertanggung jawab secara moral apa yang harus dilakukan dan terobosan apa yang harus dijalankan sehingga secepatnya dapat terjadi peningkatan mutu pendidikan. Peran LPTK sangat menentukan terhadap kualitas pendidikan, karena LPTK merupakan lembaga penghasil tenaga guru. Selain LPTK, masih banyak pihak yang terlibat dalam mewujudkan pendidikan bermutu, di antaranya dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, LPMP, MGMP, KKG, K3S, dan lainnya. Sinergi semua pihak diperlukan untuk memecahkan masalah ini.

Berdasarkan hal-hal di atas sesuai dengan kebijakan pemerintah dan penyediaan dana melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dilaksanakan penelitian **Pemetaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan di Kota Dumai dan Rokan Hilir Provinsi Riau.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil peta kompetensi peserta didik yang belum mencapai standar kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional) ?
2. Faktor apa yang menjadi penyebab tidak dikuasainya kompetensi tersebut oleh peserta didik ?
3. Bagaimana rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik ?
4. Bagaimana model implementasi pemecahan masalah dengan menyertakan berbagai institusi terkait ?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir propinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap peta kompetensi peserta didik yang belum mencapai standar kelulusan untuk setiap mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional).
2. Mengungkap faktor penyebab tidak dikuainya kompetensi tersebut oleh peserta didik.
3. Menentukan rumusan alternatif pemecahan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
4. Menentukan model implementasi pemecahan masalah dengan menyertakan berbagai institusi terkait.

D. Luaran/ Manfaat Penelitian

Penelitian pemetaan dan pengembangan mutu pendidikan SMA di Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Data mengenai kompetensi dasar yang belum dikuasai peserta didik untuk mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional).
2. Faktor-faktor penyebab peserta didik belum mekuasai standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut untuk mata pelajaran yang diuji secara nasional (Ujian Nasional).
3. Model peningkatan mutu pendidikan yang valid dan siap diimplementasikan secara konkret melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.